



Strengthening the Synergy between Bamuskal and the Village Government in Realizing Good Village Governance Based on Community Participation

Penguatan Sinergitas Bamuskal Dan Pemerintah Kalurahan Dalam Mewujudkan Good Village Governance Berbasis Partisipasi Masyarakat

R. Widodo Tripuro¹, Adji Suradji Muhammad², Rumsari Hadi Sumarto³, Supardat⁴, Saryana⁵, Supami⁶

^{1,2,3,4,6}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Indonesia

⁵Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Indonesia

Keywords:

Bamuskal,
Kalurahan
Government,
good village
governance,
community
participation,
institutional synergy

ABSTRACT

This community service program aimed to strengthen the synergy between the Kalurahan Consultative Body (Bamuskal) and the Petir Village Government in realizing good village governance based on community participation. The synergy between these two institutions is an essential factor in creating village governance that is transparent, accountable, participatory, and responsive to community needs. Several problems identified at the village level include limited institutional harmonization, weak communication between institutions, and the suboptimal involvement of the community in village development planning and supervision processes. The implementation methods of this community service program included socialization activities, participatory discussion forums, institutional assistance, and capacity building for village government officials and Bamuskal members. The activities were carried out using a participatory approach through interactive lectures, case studies, and joint deliberation sessions to develop a common understanding regarding the functions, duties, and partnership patterns between Bamuskal and the Petir Village Government. The evaluation process was conducted through observation of participant involvement, reflective discussions, and identification of changes in participants' understanding before and after the program. The results of the program showed an improvement in participants' understanding of the importance of institutional synergy in village governance implementation. In addition, a shared commitment was established between Bamuskal and the Kalurahan Government to improve coordination, transparency, and community participation in village policymaking. Strengthening this synergy serves as an important foundation for supporting democratic, innovative, and sustainable village governance. Therefore, this community service activity contributes to enhancing village institutional capacity in realizing community participation-based good village governance.

Kata Kunci:

Bamuskal,
Pemerintah
Kalurahan,
good village
governance,
partisipasi
masyarakat,
sinergitas
kelembagaan.

ABSTRAKSI

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Pemerintah Kalurahan Petir dalam mewujudkan good village governance berbasis partisipasi masyarakat. Sinergitas kedua lembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi di tingkat kalurahan antara lain masih terbatasnya harmonisasi hubungan kerja, lemahnya komunikasi kelembagaan, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, forum diskusi partisipatif, pendampingan kelembagaan, dan penguatan kapasitas aparatur kalurahan serta anggota Bamuskal. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, studi kasus, dan musyawarah bersama untuk membangun kesepahaman mengenai fungsi, tugas, dan pola hubungan kemitraan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Petir. Evaluasi kegiatan dilakukan

melalui observasi partisipasi peserta, diskusi reflektif, dan identifikasi perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya sinergitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Selain itu, terbentuk komitmen bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Petir untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa. Penguatan sinergitas tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola desa yang demokratis, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam mewujudkan *good village governance* berbasis partisipasi masyarakat.

*Corresponding author: adji.suradji@apmd.ac.id

Peer review under responsibility of Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Univ. Amikom Yogyakarta.

©2026 Hosting by Universitas Amikom Yogyakarta. All rights reserved.

<https://doi.org/10.24076/swagati.2026v4i2.2736>

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa (di D.I Yogyakarta disebut Kalurahan) merupakan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, desa dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat [1], [2]. Implementasi konsep *good village governance* menjadi penting dalam menciptakan pemerintahan kalurahan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat [3]. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat [4].

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Desa (khusus di D.I. Yogyakarta disebut Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Bamuskal) memiliki posisi strategis sebagai lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Bamuskal bersama Pemerintah Kalurahan menjadi dua elemen penting yang harus berjalan secara harmonis dan sinergis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik [5], [6]. Sinergitas tersebut tidak hanya dimaknai sebagai hubungan formal kelembagaan, tetapi juga sebagai bentuk kemitraan strategis dalam menyusun kebijakan, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam proses pemerintahan desa [7].

Namun demikian, dalam praktiknya hubungan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain lemahnya komunikasi kelembagaan, kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi masing-masing lembaga, belum optimalnya koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan, hingga munculnya ego sektoral yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, kurang optimalnya

pengawasan pembangunan desa, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan desa [8], [9], [10].

Partisipasi masyarakat sendiri merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan *good village governance* [11], [12], [13]. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Oleh karena itu, sinergitas antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan menjadi instrumen penting dalam menciptakan ruang partisipasi publik yang lebih terbuka, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya hubungan kelembagaan yang harmonis, proses pembangunan desa dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kalurahan Petir saat ini menjadi salah satu wilayah yang sedang dan terus berupaya meningkatkan kualitas dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia sebagai kalurahan dengan kinerja terbaik (skor asesmen 88,6 dengan kategori sangat baik), namun Pemerintah Kalurahan Petir yang ada di Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi kebutuhan lain yaitu akan penguatan kapasitas kelembagaan [14], khususnya dalam membangun harmonisasi hubungan kerja antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan Lurah, Ketua dan Anggota Bamuskal serta aparatur kalurahan, ditemukan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman mengenai pola kemitraan, komunikasi kelembagaan, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan sinergitas kelembagaan sebagai langkah strategis dalam mendukung terwujudnya *good village governance* [15].



Gambar 1. 1. Observasi Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Bamuskal Kalurahan Petir 2026
 Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berupa sosialisasi, forum diskusi, dan pendampingan kelembagaan yang melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan Petir, Ketua, Sekretaris dan anggota Bamuskal, serta tokoh masyarakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta pemahaman bersama mengenai pentingnya kolaborasi dan harmonisasi hubungan kerja dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguatan sinergitas antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Petir diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan desa yang demokratis dan berkelanjutan.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kalurahan Petir dengan sasaran utama anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), aparatur Pemerintah Kalurahan, tokoh masyarakat, dan unsur kelembagaan desa lainnya. Kegiatan bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan good village governance berbasis partisipasi masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang saling terintegrasi, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan Evaluasi [16], [17].



Gambar 1. 2 Alur Pelaksanaan Abdimas
 Sumber: Sumber Data, 2026.

Pada tahap persiapan dilakukan identifikasi permasalahan melalui observasi awal dan diskusi dengan pihak Pemerintah Kalurahan serta Bamuskal guna

mengetahui kondisi hubungan kelembagaan, pola komunikasi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahap ini juga dilakukan koordinasi teknis terkait jadwal, peserta, materi kegiatan, dan kebutuhan pelaksanaan pengabdian.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan forum diskusi partisipatif. Metode sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep good village governance, fungsi dan kewenangan Bamuskal, pola hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kalurahan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif menggunakan media presentasi dan studi kasus yang relevan dengan kondisi pemerintahan desa.

Selanjutnya, metode diskusi partisipatif dan musyawarah kelompok digunakan untuk menggal berbagai permasalahan yang dihadapi peserta dalam membangun harmonisasi hubungan kerja antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan. Dalam kegiatan ini peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, hambatan, serta solusi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi kelembagaan. Pendekatan partisipatif dipilih agar peserta tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan alternatif solusi.

Selain sosialisasi dan diskusi, kegiatan pengabdian juga dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kelembagaan. Pendampingan dilakukan dengan memberikan arahan mengenai mekanisme koordinasi antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan, penguatan fungsi pengawasan, penyusunan forum komunikasi rutin, serta strategi pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi tingkat partisipasi peserta, diskusi reflektif, dan identifikasi perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan pemahaman peserta mengenai tugas dan fungsi kelembagaan, meningkatnya kesadaran pentingnya sinergitas antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan, serta terbentuknya komitmen bersama dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Secara umum, metode pelaksanaan pengabdian ini menekankan pada pendekatan kolaboratif dan partisipatif sebagai upaya membangun harmonisasi hubungan kelembagaan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan good village governance berbasis partisipasi masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan sinergitas antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Petir dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi,

forum diskusi partisipatif, dan pendampingan kelembagaan. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Pemerintah Kalurahan, anggota Bamuskal, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelembagaan desa lainnya. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif dengan menekankan prinsip partisipasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan desa.

3.1. Peningkatan Pemahaman tentang Sinergitas Kelembagaan

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya sinergitas antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memahami hubungan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan hanya sebatas hubungan administratif formal. Setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi, peserta mulai memahami bahwa kedua lembaga memiliki hubungan kemitraan yang sejajar dan saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif.



Gambar 1. 3. Sosialisasi Peran Bamuskal Dalam Pengawasan Kinerja Lurah

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026.

Materi mengenai fungsi dan kewenangan Bamuskal memberikan pemahaman baru kepada peserta terkait peran Bamuskal sebagai lembaga representatif masyarakat yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Kalurahan dipahami sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik yang harus bekerja secara harmonis dengan Bamuskal. Pemahaman ini menjadi penting karena harmonisasi hubungan kelembagaan merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan stabilitas pemerintahan desa dan keberhasilan pembangunan desa.

3.2. Penguatan Komunikasi dan Koordinasi Kelembagaan

Salah satu temuan utama dalam kegiatan pengabdian adalah masih adanya hambatan komunikasi dan koordinasi antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan. Hambatan tersebut antara lain berupa kurangnya forum komunikasi rutin, perbedaan persepsi mengenai kewenangan, serta minimnya pelibatan Bamuskal dalam beberapa proses

perencanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan miskomunikasi dan konflik kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan desa.

Melalui forum diskusi partisipatif, peserta menyepakati pentingnya membangun komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif antara kedua lembaga. Salah satu hasil diskusi adalah munculnya kesepakatan untuk meningkatkan intensitas koordinasi melalui forum musyawarah rutin antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan. Forum tersebut diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi, penyelesaian permasalahan, serta penyusunan program pembangunan desa secara bersama-sama.



Gambar 1. 4. Suasana Sosialisasi dan Diskusi Bersama Bamuskal Kalurahan Petir

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026.

Penguatan komunikasi kelembagaan ini sejalan dengan prinsip *good village governance* yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan kerja yang harmonis antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan akan menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

3.3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kalurahan Petir memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Sebelum kegiatan berlangsung, hasil diskusi awal menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih bersifat terbatas dan cenderung formalitas. Masyarakat pada umumnya hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan program atau sekadar hadir dalam forum musyawarah tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang memiliki keterikatan terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Dalam forum diskusi partisipatif, peserta mengakui bahwa pola pembangunan desa selama ini masih cenderung menggunakan pendekatan *top-down*, di mana proses

perencanaan dan pengambilan keputusan lebih banyak ditentukan oleh elit pemerintahan desa. Akibatnya, beberapa program pembangunan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang belum terakomodasi secara optimal dalam proses musyawarah desa, seperti kelompok perempuan, pemuda, kelompok rentan, dan masyarakat marginal. Temuan tersebut menjadi bahan refleksi bersama mengenai pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa.

Melalui kegiatan pendampingan dan sosialisasi, peserta diberikan pemahaman bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan *good village governance*. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, ikut mengawasi pelaksanaan program, hingga terlibat dalam evaluasi pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi yang aktif, pembangunan desa diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program pembangunan desa.

Dalam kegiatan ini juga dijelaskan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu strategi yang didorong adalah optimalisasi peran Bamuskal sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat. Bamuskal didorong untuk lebih proaktif melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui forum dialog warga, musyawarah kalurahan, kunjungan langsung ke masyarakat, dan penyediaan ruang komunikasi yang lebih terbuka. Melalui pendekatan tersebut, Bamuskal diharapkan mampu menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan kebijakan Pemerintah Kalurahan.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam pembangunan desa. Pengawasan partisipatif dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga turut mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa. Dalam diskusi, peserta menyadari bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Bamuskal bersama Pemerintah Kalurahan didorong untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang melibatkan unsur masyarakat secara lebih aktif dan terbuka.

Di sisi lain, Pemerintah Kalurahan juga didorong untuk membangun budaya pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Aparatur kalurahan diberikan pemahaman bahwa keterbukaan terhadap kritik, saran, dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang demokratis. Pemerintah Kalurahan diharapkan tidak lagi memandang masyarakat hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, transparansi informasi mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran desa, dan hasil musyawarah desa menjadi hal yang perlu terus ditingkatkan.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan adanya perubahan sikap dan pola pikir peserta mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, Bamuskal, dan masyarakat. Dalam forum diskusi reflektif, peserta menyampaikan bahwa pembangunan desa akan lebih berhasil apabila seluruh elemen masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pola pemerintahan yang bersifat sentralistik dan top-down menuju tata kelola desa yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat yang muncul dalam kegiatan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya antusiasme peserta dalam forum diskusi, munculnya usulan pembentukan forum komunikasi warga secara rutin, serta adanya komitmen bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi masyarakat, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.4. Implementasi Good Village Governance

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan sinergitas antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska) dan Pemerintah Kalurahan memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan *good village governance* di tingkat desa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik masih cenderung terbatas pada aspek administratif formal. Namun setelah dilakukan sosialisasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan kelembagaan, peserta mulai memahami bahwa tata kelola pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga menyangkut proses pengambilan kebijakan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip transparansi mulai dipahami sebagai kewajiban Pemerintah Kalurahan untuk membuka akses informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran desa. Dalam forum diskusi, peserta menyadari bahwa keterbukaan informasi mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), pelaksanaan program pembangunan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, muncul komitmen bersama untuk meningkatkan publikasi informasi desa melalui forum musyawarah, papan informasi desa, media sosial kalurahan, maupun keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan.

Selain transparansi, penguatan prinsip akuntabilitas juga terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bamuskal. Sebelumnya, fungsi pengawasan sering dipahami secara sempit hanya sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta memahami bahwa pengawasan yang

dilakukan Bamuskal seharusnya bersifat konstruktif dan kolaboratif untuk memastikan program pembangunan desa berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan diskusi juga muncul kesadaran bahwa hubungan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan bukanlah hubungan subordinatif, melainkan hubungan kemitraan yang saling mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Implementasi prinsip partisipasi masyarakat juga mulai berkembang melalui peningkatan keterlibatan warga dalam forum musyawarah desa. Dalam kegiatan pengabdian, peserta diberikan pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Bamuskal didorong untuk lebih aktif menjalankan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat melalui musyawarah kalurahan, forum dialog warga, dan penyampaian aspirasi kelompok masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara optimal. Sementara itu, Pemerintah Kalurahan didorong untuk lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritik dari masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prinsip efektivitas dan responsivitas pemerintahan desa juga mulai dipahami sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Peserta memahami bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari banyaknya program fisik yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan menjadi penting agar proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, proses pengambilan keputusan di tingkat desa diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan mampu meminimalkan potensi konflik kelembagaan.

Hasil kegiatan pengabdian di Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir peserta mengenai pentingnya kolaborasi dalam pembangunan desa. Peserta memahami bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak dapat hanya dibebankan kepada Pemerintah Kalurahan semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen desa, termasuk Bamuskal, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan warga desa secara umum. Kesadaran kolektif ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun pemerintahan desa yang demokratis dan berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif dan dialogis yang digunakan dalam kegiatan pengabdian terbukti mampu menjadi sarana efektif dalam membangun harmonisasi hubungan kelembagaan di tingkat desa. Forum diskusi dan musyawarah yang dilaksanakan memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui proses dialog tersebut, tercipta kesepahaman bersama mengenai pentingnya membangun komunikasi yang sehat, saling menghargai peran

kelembagaan, serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian permasalahan desa.

Dengan semakin kuatnya sinergitas antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara lebih demokratis, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Harmonisasi kelembagaan yang terbangun melalui kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang mampu mengelola pembangunan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip *good village governance*.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan sinergitas antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska) dan Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Petir menunjukkan bahwa harmonisasi hubungan kelembagaan memiliki peran penting dalam mewujudkan *good village governance* berbasis partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan kelembagaan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi, tugas, dan pola hubungan kemitraan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya komitmen bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Penguatan sinergitas kelembagaan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan menjadi fondasi strategis dalam menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan berkelanjutan. Dengan hubungan kerja yang harmonis dan partisipatif, pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa forum koordinasi rutin, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan partisipasi masyarakat agar prinsip-prinsip *good village governance* dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat kalurahan.

5. Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan Petir beserta jajaran aparaturnya, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska), tokoh masyarakat, dan seluruh peserta kegiatan yang telah

berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan pengabdian.

Apresiasi juga disampaikan kepada Program Magister Ilmu Pemerintahan STPM “APMD” yang telah memberikan dukungan akademik dan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak sangat berarti dalam upaya penguatan sinergitas kelembagaan desa guna mewujudkan good village governance berbasis partisipasi masyarakat.

Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan tata kelola pemerintahan kalurahan yang lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

References

- [1] C. Aditya, “Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya,” *Jurist-Diction*, vol. 5, no. 4, pp. 1243–1264, 2022, doi: 10.20473/jd.v5i4.37308.
- [2] Sedarmayanti, *Good Governance Dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- [3] A. Dwipayana, Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment), 2003.
- [4] H. A. W. Widjaya, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- [5] H. Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pertama*. Jakarta: PT Penerbit Erlangga, 2011.
- [6] K. Sari, “Sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Maliku Mulia Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau,” *Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, 2022.
- [7] S. Wasistiono and I. Tahir, *Prospek Pengembangan Desa, Pertama*. Bandung: Fokusmedia., 2019.
- [8] M. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahab Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Edisi 1. Malang: Setara Press, 2014.
- [9] M. Z. Mustakim, *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015.
- [10] A. S. Muhammad, B. H. S. Tyas, and R. S. Wedadjati, *Kepemimpinan*, Cetakan Pe. Yogyakarta: APMD Press, 2024. [Online]. Available: <https://box.apmd.ac.id/drive/d/s/17DLC7DKBSSd10VF6xp aI0MfSMR2WdUU/5HHTeOCw-Mj-rdHNXhrvMdOfLGeiT7rm-77ZgsR7LAA0>
- [11] A. S. Muhammad, S. Sugiyanto, and S. Supardal, “Pendampingan Menuju Desa Wisata Banjarsari Berbasis Potensi Lokal,” *J. Widya Laksmi J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–7, 2025.
- [12] A. S. Muhammad, E. Suswaini, and Sugiyanto, “Urgensi Partisipasi Dalam Demokrasi di Era Digital,” *Peqquruang Conf. Ser.*, vol. 7, no. 2, pp. 465–470, 2025, doi: 10.35329/jp.v7i2.6743.
- [13] P. C. Wahyono and A. S. Muhammad, “The Influence of Good Governance Principles on Financial Management of the Regional Secretariat in Kulon Progo Regency,” *Arus J. Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 3, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- [14] A. T. Lestari, “Peningkatan Kapasitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Golo Manting Kec. Sano Nngoang Kab. Manggarai Barat),” *J. Inov. Sekt. Publik*, vol. 1, no. 3, pp. 1–16, 2021.
- [15] R. Purwati, “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Menuju Good Village Governance (Studi Kasus pada Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan),” *Universitas Semarang*, 2023.
- [16] A. F. Abdillah, W. Pujiyati, and A. S. Muhammad, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2025. [Online]. Available: <https://box.apmd.ac.id/drive/d/s/14pnL4G>
- [17] N. Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Ragam, Model dan Pendekatan*. Semarang: Southeast Asian Publishing, 2005.
- [18] Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [19] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.